



DINAS
PERHUBUNGAN

KABUPATEN
MINAHASA



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2021 yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Minahasa untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 akan menjadi bahan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang akan dibahas bersama-sama dengan para pihak dalam forum SKPD Tahun 2021, dan menjadi input penyusunan Rancangan RKPD yang akan disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021.

Diharapkan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021, dan menjadi acuan bagi SKPD yang lain yang terkait, karena disadari bahwa Perhubungan adalah bidang yang membutuhkan keterlibatan sektor lain utamanya dalam rangka meningkatkan jaringan perhubungan di Kabupaten Minahasa.

Disadari akan kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rancangan Renja Perubahan ini, maka masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja instansi ini di masa yang akan datang, sehingga instansi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Minahasa.

Tondano,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA

MAYA MARINA KAINDE, SH,MAP
NIP. 197109041998032006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan .

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Minahasa memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa 2019 – 2023 yaitu **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera”**.

Tahun Anggaran 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2019- 2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut, dengan harapan hasil pembangunan sektor perhubungan semakin menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi dengan jaringan transportasi yang semakin berkembang seiring dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas orang dan barang.

Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa 2019 – 2023;
4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Nomor tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2023.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

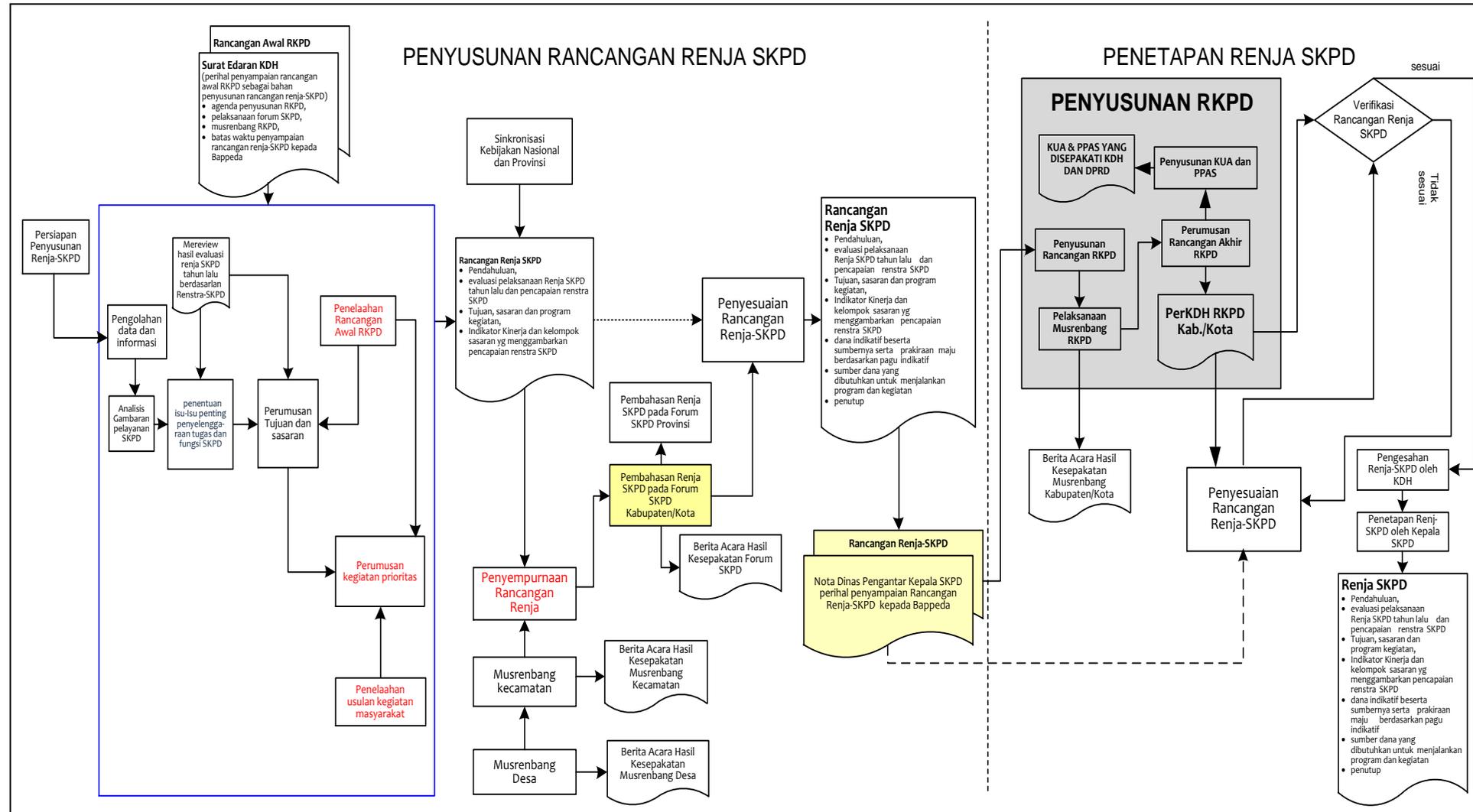
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Gambar 1.1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kabupaten Minahasa



Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008;
2. Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;
3. Identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
4. Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
5. Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
6. Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD;
7. Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
8. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan SPM;
9. Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun IKK, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada ketentuan SPM;
10. Jika SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak tercantum indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;
11. Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu

dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD

1.1. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang mendasari dan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2024;
35. Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa;
36. Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renja-SKPD Dinas Perhubungan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi sesuai rancangan awal RKPD.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Rancangan Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

- 1) Mengarahkan kinerja pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa periode 1 (satu) tahun ke depan;
- 2) Penjabaran program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang Perhubungan berdasarkan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Sebagai acuan dalam forum SKPD;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini diuraikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-2 (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun n-1 (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan SKPD.

BAB IV. PENUTUP

Bagian ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tahun 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra terhadap program-program Dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a.
 - b.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan s/d Bulan Juni 2021
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
 - a. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran Rp. 4.311.975.000,- dan terealisasi Rp. 2.039.293.937,-
 - b. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya dengan Anggaran Rp. 0,- dan terealisasi Rp.0,-
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Anggaran 0,-
 - c. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp. 17.989.145,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 4.008.750,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Anggaran Rp. 1.700.000,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Anggaran Rp. 47.100.000,- dan terealisasi Rp. 0,-

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 1 Unit dengan anggaran Rp. 347.400.000,- dan sudah difocusing
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 0,-
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 0,-
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 0,-
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran Rp. 2.500.000,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran Rp. 9.814.800,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran Rp. 1.412.400.000,- dan terealisasi Rp. 234.200.000,-
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan dengan Anggaran Rp. 33.930.000,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Anggaran Rp. 6.740.000,- dan terealisasi Rp. 0,-
- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- a. Penetapan Jaringan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten dengan Anggaran Rp. 0,-

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Anggaran Rp. 0,-
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - 1) Pembangunan Gedung Terminal dengan Anggaran Rp. 0,-
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan Anggaran Rp. 0,-
 - d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran Rp. 199.417 170,- dan terealisasi Rp.0,-
 - 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran Rp. 22.000.000,- dan terealisasi Rp. 0,-
 - e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten
 - 1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dengan Anggaran Rp. 0,-
 - f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran Rp. 0,-
 - g. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dengan Anggaran Rp. 0,-
- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum teralokasinya secara menyeluruh anggaran untuk perencanaan pembangunan perhubungan
- b. Belum teralokasinya anggaran untuk penyusunan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan
- c. Terbatasnya kualifikasi /kompetensi SDM dibidang perhubungan
- d. Belum teralokasinya anggaran untuk operasional pelayanan bus air dan bus sekolah.
- e. Terbatasnya fasilitas sarana penunjang bagi kegiatan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor di jalan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD antara lain adalah perlunya dilaksanakan koordinasi yang sinergis antara Dinas Perhubungan adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang mana pada saat ini masih belum maksimal. Untuk itu kedepan perlunya alokasi anggaran yang cukup memadai bagi program-program yang sifatnya prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat.

Secara ringkas hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan (Renja Perubahan) dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 diuraikan sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Minahasa

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor(skore 1 s.d 5)							
2	15	01	2	02	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		4.311.975.000	4.311.975.000	
2	15	01	2	05	Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Besertya Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas sebagai Penunjang Kinerja Aparatur	160.000.000			
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Tersedianya Aparatur yang berkompeten dan mempunyai kualifikasi formal				
2	15	01	2	06	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah						
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan yang memadai sebagai penunjang kinerja aparatur	5.000.000			
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor sebagai penunjang kinerja		17.989.145	17.989.145	
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	12.000.000			
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000			
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan yang berlaku	15.000.000			
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayannya Tamu dengan baik	10.000.000			
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	300.000.000			
2	15	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12
2 15 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000						347.400.000	0	
2 15 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dinas Operasional Lapangan	450.000.000								
2 15 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000								
2 15 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Memadai	198.000.000								
2 15 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2 15 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Surat Menyurat	4.500.000						2.500.000	2.500.000	
2 15 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000						9.814.800	9.814.800	
2 15 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
2 15 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.412.400.000						1.412.400.000	1.412.400.000	
2 15 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33.930.000	33.930.000	
2 15 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya							6.740.000	6.740.000	
2 15 02 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
2 15 02 2 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten										
2 15 02 2 01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Minahasa	250.000.000								
2 15 02 2 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten										
2 15 02 2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Minahasa	199.000.000								
2 15 02 2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan dengan baik									
2 15 02 2 03	Penelolaan Terminal Penumpang Tipe C										
2 15 02 2 03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya Gedung Terminal Tipe C									
2 15 02 2 03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Terminal baik fasilitas utama maupun pendukungnya									
2 15 02 2 05	Pengujian Berkala Kendaraan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun n-2 (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12
	Bermotor										
2 011 02 2 05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai							221.417170	221.417170	
2 15 02 2 06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	-									
2 15 02 2 06 05	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten	Teratasinya Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Minahasa	75.000.000								
2 15 02 2 08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										
2 15 02 2 08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya audit dan inspeksi dengan baik guna pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor									
2 15 02 2 14	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Dalam Kabupaten										
2 15 02 2 14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang di Kabupaten Minahasa	75.000.000								
	P a g u		3.275.900.000						2.104.999.865	1.757.599.865	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Minahasa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
				1 Tahun	342,305,000	1 Tahun	152,432,500	1 Tahun	217,675,000	1 Tahun	267,000,000	1 Tahun	297,000,000					
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			85%	7,171,037,600	87.50%	8,547,793,000	90%	6,638,392,035	92.50%	6,399,400,380	95%	6,834,388,387	
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

					ASN	ASN yang disediakan													
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku													
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD													
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD													
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan													
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Sem esteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun													
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran													
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD													

2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD													
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD													
2	15	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD													
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD													
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD													
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah pemanfaatan barang milik daerah SKPD													
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah													
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah													

2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan													
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Tahun	2,700,000										
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Tahun	22,951,000	1 Tahun	17,839,000	1 Tahun	17,989,145	37,818,388	38,574,756				
													50 buah 10 buah 10 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 25 dos 25 dos 15 dos 15 dos 15 dos 15 buah 15 buah 5 dos 10 rol 5 buah 10 dos 30		50 buah 10 buah 10 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 25 dos 25 dos 15 dos 15 dos 15 dos 15 buah 15 buah 5 dos 10 rol 5 buah 10 dos 30				

2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan		1 Tahun	3,900,000	420 buah	3,900,000	420 buah	2,500,000	420 buah	4,200,000		4,284,000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 Tahun	16,200,000	12 bulan 320 kwh	6,000,000	12 bulan 320 kwh	9,814,800	12 bulan 320 kwh	38,240,000		39,004,800		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia jumlah tenaga kebersihan yang tersedia jumlah tenaga pengatur lalu lintas yang tersedia jumlah tenaga pengatur perparkiran yang tersedia jumlah tenaga PKB yang tersedia jumlah tenaga sopir yang tersedia		14 orang 2 orang 30 orang 48 orang 3 orang 4 orang	1,024,800,000	14 orang 2 orang 30 orang 48 orang 3 orang 4 orang	1,412,400,000	14 orang 2 orang 30 orang 48 orang 3 orang 4 orang	1,412,400,000	14 orang 2 orang 30 orang 48 orang 3 orang 4 orang	1,412,400,000		1,440,648,000		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas jabatan : Roda Empat yang terpelihara													

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua yang terpelihara jumlah Kendaraan Dinas Operasional : Roda Empat yang terpelihara		1 Tahun	169,900,000	1 Tahun	111,275,000	1 unit	33,930,000	12 unit 0 unit	44,250,000	0	45,135,000			
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah genset (solar) yang terpelihara jumlah Personal Komputer/Notebook yang terpelihara jumlah Printer yang terpelihara		1800 liter 6 unit 6 unit	16,380,000	2100 liter 6 unit 6 unit	10,164,000	1500 liter 2 unit	6,740,000	2000 liter 6 unit 6 unit	27,720,000	0	28,274,400			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan		70%	363,649,800	74%	1,339,460,000	78%	221,417,170	83%	21,842,721	85%	686,279,575			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan tatanan transportasi lokal kabupaten minahasa yang terlaksana Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			90,000,000	1 dokumen										
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang ditetapkan														

2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang dikendalikan													
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota													
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah marka jalan didaerah rawan kecelakaan jumlah rambu jenis f yang tersedia jumlah rambu lalu lintas yang tersedia	20 unit	27,000,000	1600 m20 unit	129,560,000									
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah pemeliharaan prasarana yang di rehabilitasi			6 unit	30,000,000									
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah CCTV dijalan terpelihara													
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C														
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah rencana pembangunan terminal penumpang													
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	jumlah gedung terminal terbangun													
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah sarana dan prasarana terminal yang di kembangan													

2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)													
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	jumlah kapasitas SDM yang mengikuti pelatihan													
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir														
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan													
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan													
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1 unit	250,000,000	2 paket	221,417,170									

2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang PKB													
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar													
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia													
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan													
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diselenggarakan													
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara/Kalibrasi													
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan													

2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan													
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terselenggarakan													
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah survey rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang terlaksana	1 kegiatan	21,340,000											
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Paket	203,693,800				1 unit	21,842,721	1 unit	22,279,575				
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan													

2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan													
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan yang terlaksana	1 Kegiatan	21,616,000	1 Kegiatan	29,900,000	1 Kegiatan								
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan													
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah Kapasitas Penilai Andalalin yang ditingkatkan													
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin yang terlaksana													
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terlaksana													
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan														

2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ yang diselenggarakan													
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah inspeksi audit dan pemantauan unit pelaksana													
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal yang diselenggarakan													
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota yang diselenggarakan													
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang diselenggarakan													

2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia													
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang terlaksana													
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana													
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	jumlah Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1													

					(satu) Daerah Kabupaten/Kota	(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan													
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkendali													
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	jumlah Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota yang dirumuskan													
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terfasilitasi													
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana													
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Laut	50%	-	50%	450,000,000.00	50%	-	50%	-	55%	330,000,000.00			
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada LintasPelabuhan di Daerah Kabupaten/														

					Kota														
2	15	03	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi													
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan													
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota														

2	15	03	2.02	01	Penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin usaha penyelenggaraan sungai dan danau													
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan sungai dan danau													
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha yang diselenggarakan													
2	15	03	2.03	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin Pelabuhan sungai dan danau													

					Terintegrasi Secara Elektronik														
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau														
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan													
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan				1 unit	450,000,000								
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan													
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan													

2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rasio Konektivitas Transportasi Udara		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	5%	27,000,000.00			
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter															
2	15	04	2.01	04	Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter														
2	15	04	2.02		Penyelenggaraan Kebandarudaraan															
2	15	04	2.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan sinkronisasi dalam penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk Menunjang kegiatan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk Menunjang kegiatan bandar udara														
TOTAL									6,807,387,800		7,658,333,000		6,416,974,865		6,377,557,659		6,505,108,812			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan analisis gambaran pelayanan, ditemui adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

“ Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan”

adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

Tabel 2.3.a.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Gambaran Pelayanan SKPD					
Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan”					
1. Pelayanan Bidang Perhubungan	1. Tersedianya Konektivitas antar kawasan	SPM	Anggaran belum memadai	-	Kurangnya Anggaran Untuk sarana dan prasarana angkutan darat
	2. Tersedianya Pelayanan Angkutan Darat	SPM	Anggaran belum memadai	- Mudahnya mendapatkan kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan ilegal	Belum adanya dokumen kajian kebutuhan angkutan umum dalam trayek
	3. Tersedianya Prasarana Angkutan darat	SPM	- Kurangnya prasarana angkutan darat - Anggaran belum memadai	- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prasarana lalulintas	Kurangnya Anggaran Untuk prasarana angkutan darat
	4. Tersedianya Pelayana Angkutan Sungai dan Danau	SPM	- Masih kurangnya alat transportasi Sungai dan Danau - Anggaran belum memadai	- Masih Kurangnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Masih tingginya alih fungsi ruang publik untuk kepentingan lainnya
	5. Tersedianya Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	SPM	- Masih kurangnya Prasarana Sungai dan Danau - Anggaran belum memadai	- Pemanfaatan ruang perairan danau oleh masyarakat belum terkendali	Perlunya sinergitas antar instansi terkait untuk pengelolaan danau
	6. Managemen dan rekayasa lalu lintas	Permasalahan lalu lintas		- SDM di bidang MRLM minim	- Disiplin dan etika berlalu lintas oleh masyarakat buruk - Kurangnya fasilitas keselamatan LLAJ

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat	Dokumen Perencanaan untuk pembangunan sarana prasarana Perhubungan masih minim	Peraturan Per Undang-Undangan di bidang Perhubungan	Prioritas Pengalokasian anggaran	- Dinamika pertumbuhan mobilitas orang dan barang dan arus informasi yang semakin cepat berkembang	Belum tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang perencanaan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD maka permasalahan yang ditemui adalah **Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan** dan Adapun factor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

- I. Permasalahan Berdasarkan Kajian Pelayanan SKPD
 - a. Pelayanan Bidang Perhubungan
 - Belum adanya dokumen kajian kebutuhan angkutan umum dalam trayek
 - Kurangnya Anggaran Untuk prasarana angkutan darat
 - Masih tingginya alih fungsi ruang publik untuk kepentingan lainnya
 - Perlunya sinergitas antar instansi terkait untuk pengelolaan danau
 - Sarana Prasaran aparatur belum memadai
 - Koordinasi dengan instansi terkait
 - Belum terbentuknya unit investigasi permasalahan lalu lintas
 - Mobilitas pelayanan terbatas
 - b. Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - Belum tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang perencanaan
 - c. Penyelenggaraan Perhubungan
 - Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait kepastian hukum yang berlaku
 - d. Sumber Daya Manusia
 - Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal

Gambaran faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih disajikan dalam tabel 2.3.b berikut.

Tabel 2.3.b.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI III : Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Program :			
	1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan 2. Masalah lalu lintas yang timbul	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sebagai akses penghubung antar kawasan 2. pembentukan fórum lalu lintas	1. tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang konektivitas antar kawasan 2. terbentuknya fórum lalu lintas untuk penanganan masalah lalu lintas di kab. minahasa
		1. Pembangunan Halte/Tempat pemberhentian sementara bus dan angkutan umum 2. Pembangunan Terminal type c tataaran patar	1. Masih kurangnya Halte di wilayah kab. minahasa 2. Belum adanya anggaran untuk pembagunan terminal type c	1. Pengadaan halte diwilayah kab. minahasa 2. Terbangunnya terminal type c
	2. Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. kurangnya tingkat pelayanan pengujian kendaraan bermotor	1. belum terjangkaunya pelayanan pengujian kendaraan bermotor ke daerah-daerah pelosok	1. tersedianya mobil pengujian kendaraan bermotor keliling

Beberapa isu strategis yang berhubungan dengan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Minahasa, antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
2. Implementasi sistem PTSP, belum sepenuhnya siap berjalan dimana diwarnai adanya egosektoral karena bidang Perhubungan merupakan kegiatan lintas instansi. Kebijakan di bidang Perhubungan belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis, dan masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan
3. Masih terdapatnya hambatan-hambatan pasokan energi, regulasi, dan infrastruktur lainnya, termasuk penataan ruang wilayah serta perbaikan birokrasi yang probisnis.
4. Belum terciptanya integritas kebijakan di bidang Perhubungan yang di antaranya disebabkan terbatasnya otoritas Dinas Perhubungan .

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 yang dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, diuraikan sebagaimana tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Minahasa

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Minahasa	Kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor(skore 1 s.d 5)	3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Minahasa	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor(skore 1 s.d 5)	4		
1	Admnsitrasi Keuangan Perangkat Daerah					Admnsitrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 (Bulan/Tahun)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 (Bulan/Tahun)		
2	Admnsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Admnsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			Pengadaan Pakaian Dinas Besertya Atribut Kelengkapannya	1 tahun				Pengadaan Pakaian Dinas Besertya Atribut Kelengkapannya	1 tahun		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	12 (Bulan/Tahun)				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	12 (Bulan/Tahun)		
3	Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah					Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 (Lap/Tahun)				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 (Bulan/Tahun)		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 (Bulan/Tahun)				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 (Bulan/Tahun)		
			Penyediaan Alat Rumah Tangga	> 95%				Penyediaan Alat Rumah Tangga	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan yang berlaku	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan yang berlaku	12 (Bulan/Tahun)		
			Terlayannya Tamu dengan baik	12 (Bulan/Tahun)				Terlayannya Tamu dengan baik	12 (Bulan/Tahun)		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	12 (Bulan/Tahun)				Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dengan baik			
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah					Pemerintah Daerah					
			Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Dinas Operasional Lapangan	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Dinas Operasional Lapangan	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun		
			Tersedianya Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Memadai	1 paket				Tersedianya Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Memadai	1 paket		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Tersedianya Layanan Surat Menyurat	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Layanan Surat Menyurat	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 (Bulan/Tahun)		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 (Bulan/Tahun)				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 (Bulan/Tahun)		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-		
			Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun				Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun		
								-	-		
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten					
			Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Minahasa	1 dok				Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Minahasa	1 dok		
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					
			Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Minahasa	2 paket				Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Minahasa	2 paket		
			Terpeliharannya perlengkapan jalan dengan baik	1 paket				Terpeliharannya perlengkapan jalan dengan baik	1 paket		
3	Penelolaan Terminal Penumpang Tipe C					Penelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
			Tersedianya Gedung Terminal Tipe C	1 paket				Tersedianya Gedung Terminal Tipe C	1 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terpeliharanya Terminal baik fasilitas utama maupun pendukungnya	1 paket				Terpeliharanya Terminal baik fasilitas utama maupun pendukungnya	1 paket		
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	1 paket				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	1 paket		
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten					
			Teratasinya Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Minahasa	2 keg				Teratasinya Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Minahasa	2 keg		
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					
			Terlaksananya audit dan inspeksi dengan baik guna pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	6 keg				Terlaksananya audit dan inspeksi dengan baik guna pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	6 keg		
7	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Dalam Kabupaten					Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Dalam Kabupaten					
			Terlaksananya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang di Kabupaten Minahasa	1 tahun				Terlaksananya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang di Kabupaten Minahasa	1 tahun		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan, yang aman, tertib dan berkualitas
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dalam mendukung tingkat pelayanan jasa yang prima
3. Mewujudkan sistim pelayanan dalam bidang perhubungan, dalam pengembangan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas termasuk meningkatkan semua pelayanan agar mencapai tingkat/taraf nasional
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur perhubungan

2. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan perhubungan, yang efisien,berkualitas, aman dan harga terjangkau
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang perhubungan.
3. Terwujudnya Sistim Pelayanan Jasa Perhubungan, yang efisien, efektif dan produktif.
4. Meningkatnya profesionalitas aparatur perhubungan.

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan

1. KEBIJAKAN

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan, yang berorientasi pada fungsi pelayanan dan analisis kondisi daerah bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan sikap mental masyarakat yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang efisien dan efektif.
5. Mengembangkan mekanisme/prosedur pelayanan secara tertib, lancar, mudah, tepat waktu dan cepat.

2. PROGRAM

1. Mengembangkan Sistem pelayanan perkantoran
2. Menciptakan identitas dan dokumen perijinan yang aman dengan memberikan jaminan kepastian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan SDM yang memegang fungsi, kewenangan dan tanggung jawab administrasi teknis, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
4. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi perhubungan .
5. Melakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan laut, darat dan danau.
6. Melakukan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

3. KEGIATAN

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, website, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Pengadaan barang cetak dan penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 9) Penyediaan bahan logistik kantor
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 15) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
- 16) Pemeliharaan Bus Air Danau Tondano
- 17) Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 18) Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 19) Fasilitasi Peningkatan SDM Perhubungan
- 20) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 21) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

- 22) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
- 23) Penyusunan kebijakan norma, standart dan proseder dibidang perhubungan
- 24) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan angkutan umum perkotaan dan perdesaan
- 25) Penyusunan alur pelayaran Danau Tondano
- 26) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 27) Penyesuaian teknologi pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- 28) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
- 29) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
- 30) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
- 31) Manajemen rekayasa lalu lintas kota Tondano
- 32) Pengoperasian bus sekolah
- 33) Peyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
- 34) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- 35) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- 36) Sosialisasi keselamatan pelayaran
- 37) Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan
- 38) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan
- 39) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatran penumpang
- 40) Penataan tempat-tempat pemberhentian umum
- 41) Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
- 42) Pengadaan tanah terminal
- 43) Pengadaan lahan pelabuhan/dermaga
- 44) Pembangunan gedung terminal
- 45) Pembangunan halte, bus, taxi, gedung terminal
- 46) Pembangunan shelter angkutan Danau Tondano
- 47) Pembangunan pos pengawasan pelayaran
- 48) Pembangunan garasi bus air Danau Tondano
- 49) Pengadaan rambu lalu lintas
- 50) Pengadaan marka jalan
- 51) Pengadaan pagar pengaman jalan
- 52) Pengadaan dan pemasangan paku pembatas jalan
- 53) Pemasangan Warning Light

- 54) Pemasangan PJU
- 55) Pemasangan Cermin Tikungan
- 56) Pemasangan Guadriil
- 57) Pengadaan Unit Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling
- 58) Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor
- 59) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan :

Tujuan pembangunan bidang perhubungan adalah:

1. **Meningkatnya pelayanan umum bidang transportasi** yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Minahasa lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat;
2. **Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi** guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah;
3. **Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan perdesaan yang efisien, dan berwawasan lingkungan** yang akan berdampak pada minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat;

Sasaran:

Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2019 adalah :

Sasaran Pembangunan Perhubungan :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi;
3. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah;
5. Meningkatkan kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan;

3.4 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Minahasa lebih sejahtera dan bermartabat yang diterjemah kedalam 11 sasaran RPJMD 2020- 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 2) Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak langsung tercapainya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Minahasa
- 3) Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal bidang perhubungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2013,
- 4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil pertanian, perikanan dan pariwisata
- 5) Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas antar wilayah yang masih minim sarana angkutan di wilayah Minahasa.

3.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa Sasaran pembangunan bidang perhubungan dalam lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perijinan
2. Menurunnya tingkat kecelakaan dan kesemrawutan lalu lintas
3. Meningkatnya pelayanan publik dengan adanya sarana dan prasarana bidang perhubungan.
4. Meningkatnya aksesibilitas dibidang perhubungan.

Perencanaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan melalui penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) yang merupakan Master Plan/Studi Pola Pergerakan atau pola aktifitas dalam lingkup tata ruang Kabupaten Minahasa sehingga dapat menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan penumpang umum dan menjaga iklim investasi.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 .

3.6. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa di prioritaskan pada beberapa program yaitu:

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pembangunan Gedung Kantor
 - 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 6) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor
 - 7) Pemeliharaan Bus Air Danau Tondano

3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian KORPRI
 - 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
 - 2) Kinerja SKPD
 - 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan / Kedaerahan
 - 1) Pelaksanaan Pameran dan Promosi
 - 2) Pelaksanaan Upacara Hari Perhubungan

7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 1) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat
 - 2) Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan

- 3) Peningkatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 4) Sosialisasi di bidang perhubungan
- 5) Penyusunan rencana induk LLAJ dan LLASDP
- 6) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan angkutan umum perkotaan dan perdesaan
- 7) Penyusunan alur pelayaran Danau Tondano
- 8) Survey kebutuhan fasilitas keselamatan LLASDP
- 9) Pelatihan Anak Buah Kapal
- 10) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
- 11) Koordinasi fungsi kebijakan bidang perhubungan

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 1) Penyuluhan bagi para sopir/Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
- 2) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
- 3) Pengendalian disiplin pengopeasian angkutan umum di jalan raya
- 4) Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
- 5) Manajemn rekayasa lalu lintas
- 6) Pengoperasian bus sekolah
- 7) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
- 8) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
- 9) Sosialisasi Keselamatan Pelayaran
- 10) Pemeliharaan bus air danau tondano
- 11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program Pembangunan Sarana, dan Prasarana Perhubungan

- 1) Pengadaan Tanah Terminal
- 2) Pengadaan Tanah Pelabuhan/Dermaga
- 3) Pengadaan Kendaraan Bus Keliling Danau Tondano
- 4) Pembangunan Gedung terminal
- 5) Pembangunan selter angkutan Danau Tondano
- 6) Pembangunan pos pengawasan pelayaran
- 7) Pembangunan garasi Bus air Danau Tondano

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1) Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- 2) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
- 3) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan / Delineator
- 4) Pengadaan Paku Pembatas Jalan
- 5) Pengadaan dan Pemasangan PJU
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Guadrail
- 8) Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas, perparkiran serta pengujian kendaraan bermotor

10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- 1) Pengadaan alat pengujian keliling kendaraan bermotor
- 2) Pengadaan peralatan Pengujian antara lain :
 1. 1 set alat PKB dengan system komp operation
 2. alat pengukur prosentase cahaya matahari
- 3) Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor

11. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan bermotor
- 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/pelabuhan
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas keselamatan LLAJ dan LLASDP
- 4) Penyesuaian Teknologi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

12. Program Peningkatan SDM bidang Perhubungan

- 1) Pelatihan SDM dalam bidang perhubungan
- 2) Pelatihan Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Pelajar
- 3) Peningkatan SDM pengujian PKB
- 4) Diklat SDM PPNS
- 5) Diklat Manajemen rekayasa lalu lintas
- 6) Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan
- 7) Diklat manajemen operasional terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan

3.7. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Minahasa

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	09	Perhubungan									
2	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor(skore 1 s.d 5)	Kab. Minahasa	4		APBD	Menunjang melaksanakan tugas teknis Bidang Perhubungan	4	
2	09	01	04	Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan	Tersedianya jasa layanan pengadministrasian pengelolaan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Tondano	12 (Bulan/Tahun)			12 (Bulan/Tahun)	
2	09	01	05	Penyediaan Jasa Pengelola Barang dan Jasa	Tersedianya data administrasi Barang Milik Daerah (Laporan Pendataan BMD, Laporan Penilaian Aset BMD, Laporan Penyusunan Database BMD, Laporan Program Sertifikasi BMD, Laporan Penghapusan BMD, Laporan Pengamanan Dokumen Kepemilikan dan Pemrosesan BMD, Laporan Pembinaan BMD, dan Laporan Penandatanganan Pemanfaatan BMD.)		12 (Bulan/Tahun)			12 (Bulan/Tahun)	
2	09	02	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis SKPD		12 (Bulan/ Tahun)	15.894.800		12 (Bulan/ Tahun)	35.000.000
2	09	02	03	Penyediaan Alat Listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik dan elektronik sebagai penunjang kinerja apartur		1 tahun	2.700.000		1 tahun	5.000.000
2	09	02	04	Penyediaan Materai	Tersedianya Materai untuk menunjang pelaksanaan teknis kegiatan / kinerja SKPD		12 (Bulan/Tahun)	3.900.000		12 (Bulan/Tahun)	3.000.000
2	09	02	05	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan untuk penunjang kenyamanan pekerjaan		12 (Bulan/Tahun)	5.099.000		12 (Bulan/Tahun)	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	09	02	06	Penyediaan BBM (genset)	Tersedianya BBM genset sebagai penunjang kinerja		12 (Bulan/Tahun)	11.880.000		12 (Bulan/Tahun)	20.000.000	
2	09	02	11	Penyediaan Bendera	Tersedianya Bendera sebagai lambang Negara dan bendera hias		12 (Bulan/Tahun)	3.800.000		12 (Bulan/Tahun)	2.500.000	
2	09	03	01	Penyediaan Telepon	Tersedianya layanan telepon		12 (Bulan/Tahun)	600.000		12 (Bulan/Tahun)	1.000.000	
2	09	03	03	Penyediaan Listrik	Tersedianya listrik sebagai penunjang kinerja		12 (Bulan/Tahun)	6.600.000		12 (Bulan/Tahun)	6.000.000	
2	09	03	05	Penyediaan Surat kabar	Tersedianya surat kabar sebagai sumber informasi		12 (Bulan/Tahun)	7.200.000		12 (Bulan/Tahun)	3.000.000	
2	09	03	06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/ TV Satelit	Tersedianya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/ TV Satelit		12 (Bulan/Tahun)	10.000.000		12 (Bulan/Tahun)	10.000.000	
2	09	03	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan sebagai perawatan peralatan dan perlengkapan kantor		12 (Bulan/Tahun)	4.500.000		12 (Bulan/Tahun)	10.000.000	
2	09	03	18	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor dan penunjang kenyamanan bekerja		12 (Bulan/Tahun)	30.000.000		12 (Bulan/Tahun)	36.000.000	
2	09	03	23	Penyediaan Jasa Sopir	Tersedianya jasa Sopir untuk pengoperasian kendaraan dinas/operasional		12 (Bulan/Tahun)	134.400.000		12 (Bulan/Tahun)	146.400.000	
2	09	03	38	Penyediaan Jasa Tenaga Administrtasi Perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran , Operator Komputer		12 (Bulan/Tahun)	201.600.000		12 (Bulan/Tahun)	119.600.000	
2	09	06	01	Penyediaan Barang Cetakn	Tersedianya barang cetakan untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis SKPD		12 (Bulan/Tahun)	36.475.000		12 (Bulan/Tahun)	40.000.000	
2	09	06	02	Penyediaan Penggandaan	Tersedianya penggandaan untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis SKPD		12 (Bulan/Tahun)	1.500.000		12 (Bulan/Tahun)	5.000.000-	
2	09	06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis SKPD		12 (Bulan/Tahun)			12 (Bulan/Tahun)		
2	09	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 (Bulan/Tahun)			12 (Bulan/Tahun)		
2	09	11	02	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Layanan makan minum rapat		12 (Bulan/Tahun))	44.460.000		12 (Bulan/Tahun)	65.000.000	
2	09	11	02	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Tersedianya Layanan makan minum tamu		12 (Bulan/Tahun)	2.200.000		12 (Bulan/Tahun)	10.000.000	
2	09	15	02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tingkat akomodasi Rakor dan Konsultasi Luar Daerah	Kab. Minahasa	12 (Bulan/Tahun)	75.000.000	APBD	Menunjang melaksanakan tugas teknis Bidang Perhub	12 (Bulan/Tahun)	75.000.000
2	09	15	01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tingkat akomodasi Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah		12 (Bulan/Tahun)	85.000.000			12 (Bulan/Tahun)	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur minimal					
					Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai thd layanan prasarana dan sarana kantor (skore 1 s.d 5)					
2	09	02	05	Pengadaan kendaraan operasional - - roda 4 - roda 2	Tersedianya kendaraan operasional unruk kepentingan Dinas				2 unit 4 unit	
2	09	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia (Gorden, Papan Nama Kantor, Papan Data/ Informasi, Simbol-Simbol Kenegaraan, Aksesoris Gedung Kantor Lainnya)	Kab. Minahasa		APBD 0	Menunjang melaksanakan tugas teknis Bidang Perhub	1 paket
2	09	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia			37.172.000		1 paket 25.000.000
2	09	02		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Yang Tersedia - Meja Biro - Meja ½ Biro - Meja Rapat - Kursi Rapat - Meja + Kursi Tamu - Kursi Berlengan - Almari					1 paket
2	09	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Rutin/Berkala					
2	09	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara Rutin/Berkala - Kendis Roda 4 - Kendis Roda 2			1 Tahun 159.900.000		1 Tahun 175.000.000
2	09	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit Bangunan Yang terehabilitasi					
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai					1 paket
				Pemeliharaan Bus Air Danau Tondano	Terpeliharanya Bus Air Danau Tondano					2 unit
2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tingkat disiplin kehadiran pegawai sesuai jam kerja - Tingkat disiplin kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari hari tertentu	Kab. Minahasa		>85 >85	APBD Menunjang Implementasi SPM Dishub	550.000.000
2	09	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan pemerintah (PSL, PSR, PSH, PDH, Pakaian Dinas kantor)			60 pasang 39.000.000		150 pasang
2	09	03	02	Pengadaan Pakaian olah raga	Jumlah pakaian olah raga yang diadakan pemerintah			60 pasang 30.000.000		65 pasang 51.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 09 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan pemerintah - Pakaian Batik - Pakaian KORPRI		50 pasang	30.000.000			50 pasang	48.750.000
2 09 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat yang mengikuti diklat penjenjangan struktural							
2 09 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pejabat struktural yang mempunyai kualifikasi formal diklat PIM dan prajab			8				
09 05 01	Pendidikan dan pelatihan PKB	Tersedianya tenaga teknis di bidang PKB						2 orang	25.000.000
2 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dan terdistribusi tepat waktu			100				
2 09 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Triwulanan, Semesteran, Tahunan)						7	6.000.000
2 09 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun						2	4.000.000
2 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan							
2 09 15 01	Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana perhubungan darat		1 paket	90.000.000			1 paket	70.000.000
2 09 15 02	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah		1 (Kegiatan/Tahun)				1 (Kegiatan/Tahun)	
2 09 15 03	Koordinasi dalam pembangunan dan fasilitas perhubungan	Jumlah Koordinasi dalam pembangunan dan fasilitas perhubungan		1 (Kegiatan/ Tahun)	21.340.000			1 (Kegiatan/ Tahun)	
2 09 15 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah kegiatan sosialisasi di bidang perhubungan		1 (paket/Tahun)				1 (paket/Tahun)	
	Koordinasi Pembangunan Perhubungan	Tingkat koordinasi pembangunan melalui hari perhubungan		1 (paket/Tahun)	103.693.800			1 (paket/Tahun)	
2 09 15 05	Penyuaunan rencana induk jaringan LLAJ, LLASDP	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ, LLASDP		1 (Tahun)				1 (Tahun)	
2 09 15 06	Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan angkutan umum perkotaan dan perdesaan	Jumlah jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan angkutan umum perkotaan dan perdesaan		1 (Kegiatan/ Tahun)				1 (Kegiatan/ Tahun)	
2 09 15 07	Penyusunan alur pelayaran Danau Tondano	Jumlah alur pelayaran Danau Tondano		1 (Kegiatan/Tahun)				1 (Kegiatan/Tahun)	
2 09 15 08	Survey kebutuhan fasilitas keselamatan LLASDP	Jumlah Survey kebutuhan fasilitas keselamatan LLASDP		2 (Kegiatan/Tahun)				2 (Kegiatan/Tahun)	
2 09 15 09	Pelatihan Anak Buah Kapal	Jumlah ABK terlatih							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	09	15	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan				
2	09	15	11	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat					
				Koordinasi fungsi kebijakan di bidang perhubungan	Tingkat koordinasi yang diadakan			1 kegiatan	10.000.000
				Pembangunan Terminal Type C	Jumlah Terminal yang ada			1 paket	
				Pembangunan garasi Busa Air Danau Tondano				1 paket	
2	09	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
2	09	16	05	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte	Terawatnya Prasarana Fasilitas Umum				
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan bermotor	Peningkatan jaminan keselamatan				
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/pelabuhan	meningkatnya pelayanan terminal				
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas keselamatan LLAJ dan LLASDP	Tersedianya fasilitas keselamatan yang terawat dan terpelihara				
				Penyesuaian Teknologi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatnya pelayan sesuai dengan dinamika peraturan dan teknologi				
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terselenggaranya pelayanan angkutan yang maksimal				
2	09	17	01	Penyuluhan bagi para sopir/Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah kegiatan sosialisasi bagi para sopir/Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang				
2	09	17	02	Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan				
2	09	17	02	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Terselenggaranya kegiatan pengawasan operasional kapal di bawah GT-7 di wilayah perairan Kab.Minahasa				
2	09	17	03	Pengendalian disiplin pengopeasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengendalian disiplin pengopeasian angkutan umum di jalan raya				
2	09	17	04	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum				
2	09	17	05	Manajemn rekayasa lalu lintas kota Tondano	Rekomendasi dan implementasi hasil analisis data survey lalu lintas dan angkutan jalan				
								1 set	1.750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 09 17 06	Pengoperasian bus sekolah	Jumlah bus sekolah yang beroperasi	Kab.Minahasa			A P B D			
2 09 17 07	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan							
2 09 17 08	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan	Jumlah kegiatan pemilihan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan			21.616.000			1 keg	30.000.000
2 09 17 09	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran							
2 09 17 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan							
	Pemeliharaan Bus Air Danau Tondano	Terpeliharanya Bus Air Danau Tondano	Dishub					2 unit	
2 09 18	Program Pembangunan Sarana, dan Prasarana Perhubungan	Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan yang mampu mengakomodasi mobilitas dan koneksitas masyarakat							
2 09 18 01	Pengadaan Tanah Terminal	Tersedianya lahan bagi pembangunan prasarana perhubungan/terminal			0			2 (Bidang)	
2 09 18 02	Pembangunan Gedung terminal	Terbangunnya gedung terminal						1 (unit)	
2 09 28 03	Pembangunan selter angkutan Danau Tondano	Terbangunnya unit Selter angkutan danau Tondano			0			4 (unit/Tahun)	
2 09 28 04	Pembangunan pos pengawasan pelayaran	Terbangunnya unit pos pengawasan pelayaran			0			2 (unit/Tahun)	
2 09 28 05	Pembangunan garasi Bus air Danau Tondano	Terbangunnya garasi bus air danau tondano			0			1 (unit/Tahun)	
2 09 28 06	Pengadaan bus perintis angkutan kota	Tersedianya bus angkutan perintis untuk melayani masyarakat			0			2 (unit)	
2 09 28 07	Pembangunan Halte, bus taksi, gedung terminal	Tersedianya halte sebagai fasilitas naik turun penumpang angkutan umum						4 (unit/Tahun)	
2 09 18 12	Pembangunan Kanal/Dermaga Sungai Tondano	Tersedianya Kanal/Dermaga Sungai Tondano						1 paket	
2 09 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan pengamanan lalu lintas							
2 09 19 01	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya rambu lalu lintas jenis F dan rambu-rambu lalu lintas lainnya di daerah rawan kecelakaan - Jenis F - Rambu Lalu Lintas			27.000.000			10 unit 50 unit	154.000.000 100.000.000
2 09 19 02	Pengadaan Marka Jalan	Terpasangnya marka jalan di daerah rawan kecelakaan						9185 m	103.200.000
2 09 19 03	Pengadaan Pagar pengaman jalan /	Terpasangnya pagar pengaman jalan/						1053	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Deliniator						(buah/Tahun)	
2	09 19 04	Pengadaan dan pemasangan paku pembatas jalan		Terpasangnya paku pembatas jalan di daerah rawan kecelakaan				1932 (buah/Tahun)	
2	09 19 05	Pemasangan PJU		Terpasangnya P J U di daerah rawan kecelakaan		0		15 (unit/Tahun)	
2	09 19 06	Pemasangan Cermin Tikungan		Terpasangnya Cermin Tikungan di daerah rawan kecelakaan		0		9 (buah/Tahun)	
2	09 19 07	Pemasangan guadril		Terpasangnya guadril di daerah rawan kecelakaan		0		600 (meter/Tahun)	
		Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas, parkir serta pengujian kendaraan bermotor		Terbayarnya jasa THL		665.856.200			504.000.000
2	09 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Terjaminnya kelaikan kendaraan bermotor					
2	09 20	Pengadaan alat pengujian keliling kendaraan bermotor		Meningkatnya wilayah pelayanan PKB		0			
2	09 20	Pengadaan peralatan Pengujian 1. Dongkrak 2. alat pengukur prosentase cahaya matahari		Meningkatnya pelayanan UPKB Tondano		0			
		Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Terpeliharanya peralatan PKB		110.000.000			75.000.000
Pagu						2.017.566.800			2.259.000.000

Dasar pertimbangan perumusan program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020 adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pencapaian Indikator Kinerja Kunci bidang Perhubungan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan masing-masing adalah 12 (dua belas) program dan 68 (enam puluh delapan) kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar di seluruh wilayah kabupaten Minahasa
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp. 2.259.000.000,-

Berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2020 maka rumusan program dan kegiatan dilakukan penyesuaian, termasuk dari aspek pagu indikatif berdasarkan pertimbangan prioritas dan kebutuhan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan perangkat daerah rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 disajikan pada table berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	1 5 1	0 1							
			PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah					6.708.968.400,00
2	1 5 1	0 2	2, 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			4.404.074.400,00
2	1 5 1	0 2	2, 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	45 orang		45 orang 4.404.074.400,00
2	1 5 1	0 5	2, 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja			149.940.000,00

2	1	0	2,	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian olahraga yang diadakan	150 pasang				50 pasang	149.940.000,00
						jumlah pakaian batik yang diadakan	150 pasang	-			50 pasang	-
						jumlah pakaian korpri yang diadakan		-			65 pasang	-
2	1	0	2,	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		-			1 dokumen	-
2	1	0	2,	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang habis pakai, barang cetakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, makanan dan minuman dalam memfasilitasi kegiatan dan perjalanan dinas untuk koordinasi			70.797.895,00			479.400.000,00
2	1	0	2,	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalansi listrik yang diadakan	10 jenis	-			7 titik	4.590.000,00
						jumlah lampu led 33 watt yang diadakan		-			7 buah	-
						jumlah meteran listrik daya 3500 VA yang diadakan		-			13 unit	-
						jumlah terminal legran 25mm yang diadakan		-			50 buah	-
2	1	0	2,	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Lem Sedang yang disediakan	50 jenis	17.989.145,00			5	158.181.600,00
						jumlah Lakban Kertas		20 buah			10	

						Max 1210 yang disediakan			-										
						jumlah Lakban Hitam Joyko 2: Kain yang disediakan			-										10
						jumlah Lakban Hitam Kenko 36Mm yang disediakan			-										10
						jumlah Lakban Hitam Kenko 48Mm yang disediakan			-										10
						jumlah Lakban Hitam Hitam Polyken yang disediakan			-										10
						jumlah Kertas Stiker Sun Glossy yang diadakan			-										10
						jumlah Odner Folio Bantex 1446-01 yang disediakan			-										54
						jumlah Box File Fc Brw Wood yang disediakan			-										15
						jumlah Elevated Tray Dokument yang disediakan			-										7
						jumlah Penggaris Plastik Butt Garisan Besi 60Cm yang disediakan			-										10
						jumlah Double Tape 3M yang diadakan			-										10
						jumlah Clipboard Bambi Fc Crm Wood yang disediakan			-										5
						White Board Supertop 60X120 Magnet yang disediakan			-										2

						Spidol Whiteboard Snowman Bg-12 Blk yang disediakan			-			20	
						jumlah Penghapus White Board Penghapus Be-3515 yang disediakan			-			2	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Sapu Lantai Motif Broom yang tersedia							
			1	0		jumlah Sapu Lidi- yang tersedia							
						jumlah Skep Sampah Lion Star yang tersedia							
						jumlah Tempat Sampah Plastik Lion Star yang tersedia							
						jumlah Kemoceng bulu ayam warna yang tersedia							
2	1	0	2,	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Aqua Galon yang disediakan							
			1	0		jumlah sabun cuci cair yang disediakan			-				-
						jumlah sabun mandi cair yang disediakan			-			53 galon	17.258.400,00
						jumlah Hand Sanitizer yang disediakan			-			12 botol	-
						jumlah masker yang disediakan			-			20 dos	-
2	1	0	2,	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan	10 jenis	4.008.750,00				7500 lembar	30.600.000,00
			1	0		jumlah pencetakan STS			-			25 buku	-
			0	6									

						jumlah pencetakan baliho			-			50M2	-
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		3 buku	-				
	5	1	0	6									
2	1	0	2,	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi		10 orang	1.700.000,00			30 orang/kali	7.650.000,00
	5	1	0	8									
2	1	0	2,	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum rapat yang tersedia		70 orang	47.100.000,00			59 orang/kali	261.120.000,00
	5	1	0	9									
						jumlah transportasi darat tondano ke manado		50 bulan	-			59 orang/kali	-
						jumlah perjalanan dinas dalam kabupaten Minahasa		30 orang	-			548 orang/kali	-
2	1	0	2,		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan, mesin dan gedung kantor atau bangunan yang di adakan			-				20.400.000,00
	5	1	0	7									
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan roda 4 yang disediakan							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional perawatan dan pemeliharaan fasilitas LLAJ yang di adakan							
2	1	0	2,	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laptop Asus VivoBook Ultra A412FLIntel yang diadakan			-				-
	5	1	0	6									
						jumlah Scanner HP							

						Scanjet 5000 yang diadakan			-									-	
						Jumlah alat komunikasi yang diadakan	9 unit		-									20.400.000,00	
2	1	0	2,	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah papan nama kantor yang diadakan			-					1 unit				-	
2	1	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan dan kepegawaian yang didukung dengan pelayanan administrasi yang baik												1.424.714.800,00	1.471.554.000,00
2	1	0	2,	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 10000 yang disediakan	12 bulan		2.500.000,00					420 buah				3.978.000,00	
2	1	0	2,	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa internet up to 100 Mbps tersedia	12 bulan		9.814.800,00					12 bulan				26.928.000,00	
						jumlah jasa listrik tersedia			-					320 kwh				-	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor													
2	1	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	12 bulan		1.412.400.000,00					14 orang				1.440.648.000,00	
						jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	12bulan		-					2 orang				-	
						jumlah tenaga pengatur lalu lintas yang tersedia	12 bulan		-					30 orang				-	
						jumlah tenaga pengatur perpajakan	81 orang		-					48 orang				-	

2	1	0	2,		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan			-					-
5	2	0	1											
2	1	0	2,	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan tatanan transportasi lokal kabupaten minahasa yang terlaksana			-					-
5	2	0	1											
2	1	0	2,		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang diadakan			-					264.842.550,00
5	2	0	2											
2	1	0	2,	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah marka jalan didaerah rawan kecelakaan yang terpasang	1500 meter		-			2500 meter		208.398.750,00
5	2	0	2											
						jumlah rambu jenis F yang tersedia								-
						Jumlah rambu lalu lintas yang tersedia								-
2	1	0	2,	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah CCTV di jalan yang terpelihara	51 hari		-			16 titik		56.443.800,00
5	2	0	2	4										
2	1	0	2,		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola			-					-
5	2	0	3											
2	1	0	2,	0	Pembangunan Gedung Terminal	jumlah Gedung Terminal yang dibangun			-					-
5	2	0	3											
2	1	0	2,	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah fasilitas pendukung terminal yang memadai jumlah terminal yang terpeihara			-					-
5	2	0	3	4										
2	1	0	2,		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat dan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor yang diadakan			221.417.170,00					430.500.000,00
5	2	0	5											

2	1	0	2,	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Gas Analyser (computerized) yang tersedia	1 paket	199.417.170,00			1 unit	430.500.000,00
						jumlah Tint Tester yang tersedia		-				-
2	1	0	2,	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	800 buah	22.000.000,00				-
2	1	0	2,		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan		-				-
2	1	0	2,	0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang terlaksana		-				-
2	1	0	2,		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		-				52.500.000,00
2	1	0	2,	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan untuk Keselamatan dijalan		-				52.500.000,00
2	1	0	2,		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten		-				-
2	1	0	2,	0	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan		-				-

					Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terfasilitasi							
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan			-				-
2	1	0	2.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten			-				-
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan			-				-
									Total				Total
									5.773.386.865,00				7.456.810.950,00

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan. Renja Perubahan ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Tondano, 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA

MAYA MARINA KAINDE, SH, MAP
NIP. 197109041998032006